KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email :brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 283/Kpts/HM.130/H.12.32/02/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang :

a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
b. Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan melayani informasi publik bidang pertanian, PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
i. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
n. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
a. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 02 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik dan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan 1 (satu) tahun sekali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 18 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau,



Dr. Rudi Hartono, S.P, M.P
NIP 197304301999031001

Tembusan :
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
Nomor : 283/Kpts/HM.130/H.12.32/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check UP Pegawai	1. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menpan No PER/04M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi lapora keuangan yang telah diaudit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
3	Dokumen Pengadaan PBJ yang masih dalam proses evaluasi	1. Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Poin b) 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan persaikan tidak sehat	Menghindari persaingan	Setelah proses pengadaan selesai

Tanjungpinang, 18 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau,

Dr. Rudi Hartono, S.P, M.P
NIP 197304301999031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).